

LAPORAN KINERJA 2023



KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU
KANWIL DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN
MALUKU UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu Tahun 2023 disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan kepada KPKNL Palu selama periode tahun 2023. Laporan Kinerja KPKNL Palu disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas instansi KPKNL Palu pada pihak yang memberi amanah sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palu. Disamping itu, Laporan Kinerja juga dapat digunakan sebagai alat kendali dan penilai kinerja secara kualitatif serta wujud transparansi instansi dalam rangka terwujudnya *good governance*.

Selama tahun 2023, KPKNL Palu telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam peta strategis KPKNL Palu Tahun 2023 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja KPKNL Palu Tahun 2023, terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam Laporan Kinerja KPKNL Palu akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2023 dengan kontrak kinerja tahun 2023, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh KPKNL Palu.

KPKNL Palu berupaya untuk terus mengoptimalkan kinerja dalam mencapai visi dan misi agar amanah yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan. Selama tahun 2023, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palu mencapai 111,65.

Kami harapkan penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Palu Tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan dan sebagai pertanggungjawaban KPKNL Palu atas upaya pencapaian visi dan misi yang dibebankan pada tahun 2023.

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Palu dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

TUGAS DAN FUNGSI KPKNL PALU

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.01/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN memiliki instansi vertikal yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah dan 71 (tujuh puluh satu) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang / KPKNL.

KPKNL Palu merupakan salah satu instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara di Manado. KPKNL Palu mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Palu menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan Negara;

3. Registrasi, penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyimpanan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang Negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau pinjaman hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada pejabat lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;

STRUKTUR ORGANISASI KPKNL PALU

Struktur organisasi KPKNL Palu adalah sebagai berikut:



Salah satu kantor operasional DJKN yang beroperasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah KPKNL Palu yang berkedudukan di Kota Palu dengan wilayah kerja meliputi 13 kota/kabupaten yaitu:

1. Kota Palu,
2. Kabupaten Banggai,
3. Kabupaten Banggai Kepulauan,
4. Kabupaten Banggai Laut,
5. Kabupaten Buol,
6. Kabupaten Donggala,
7. Kabupaten Morowali,
8. Kabupaten Morowali Utara,
9. Kabupaten Parigi Moutong,
10. Kabupaten Poso,
11. Kabupaten Sigi,
12. Kabupaten Tojo Una-Una dan
13. Kabupaten Toli-Toli.

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, KPKNL Palu memiliki sumber daya manusia berjumlah 32 pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Komposisi Pegawai KPKNL Palu Berdasarkan Jabatan dan Golongan

No.	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Pelaksana	-	12	7	-	19
2.	Jabatan Fungsional	-	1	6	-	7
3.	Eselon IV	-	-	5	-	5
4.	Eselon III	-	-	-	1	1
Jumlah		-	13	18	1	32

Komposisi Pegawai KPKNL Palu Berdasarkan Kelompok Umur dan Golongan

No.	Umur	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	18-30	-	13	4	-	17
2.	31-40	-	-	7	-	7

3.	41-50	-	-	4		4
4.	> 50	-	-	3	1	4
Jumlah		-	13	18	1	32

Komposisi Pegawai KPKNL Palu Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Laki-laki	-	7	12	1	18
2.	Perempuan	-	6	6	-	12
Jumlah		-	13	18	1	32

PERAN STRATEGIS KPKNL PALU

A. PERAN STRATEGIS

KPKNL Palu sebagai instansi vertikal DJKN melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, visi dan misi organisasi sehingga tercapai pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. KPKNL Palu mempunyai peran/aspek strategis antara lain:

- a. Subbagian Umum yang merupakan bagian penunjang tugas dan fungsi KPKNL dan mempunyai tugas di bidang kepegawaian diantaranya:
 - Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan formasi pegawai;
 - Melaksanakan administrasi kepegawaian seperti DP3, laporan LP2P, dan KP4;
 - Mengusulkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - Mengurus permintaan Kartu Taspem, Karpeg, Askes; dan
 - Menyusun laporan absensi bulan kantor.

Sedangkan di bidang keuangan Subbagian Umum mempunyai tugas:

- Menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) berdasarkan dana yang tersediadalam DIPA dan
- Menyelenggarakan pembayaran gaji/TKPN dan/atau penghasilan lainnya.

Pada bagian Penatausahaan BMN/Inventaris Kantor serta Pengadaan Barang

dan Jasa tugas Subbagian umum adalah:

- Menyelenggarakan inventarisasi BMN pada kantor pelayanan;
- Menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan barang/jasa keperluan kantor;
- Menyelenggarakan penyimpanan dan pendistribusian barang keperluan kantor; dan
- Menyusun konsep rencana penghapusan barang inventaris kantor.

Subbagian Umum juga mempunyai tugas dalam bidang Layanan Umum dan Laporan seperti :

- Menyelenggarakan urusan surat masuk dan keluar, dan penggandaan;
- Menyelenggarakan penyusutan arsip yang telah memenuhi jadwal retensi arsip;
- Melakukan pemasangan iklan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyelenggarakan kebersihan, keamanan dan upacara bendera;
- Menyusun bahan masukan konsep rencana strategi, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan; dan melaksanakan pembinaan kepada para pelaksana.

- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, KPKNL Palu memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil gunaterutama difokuskan pada kegiatan utilisasi BMN, pengukuran kinerja BMN, pengamanan BMN, dan penatausahaan BMN. Untuk tahun 2023, fokus pengelolaankekayaan negara ditujukan pada utilisasi BMN, evaluasi kinerja BMN, dan sertifikasi terhadap 604 NUP objek tanah.
- c. Bidang Pelayanan Penilaian, KPKNL Palu memiliki peran strategis dalam melakukanpenilaian BMN dan barang jaminan piutang negara dengan tujuan untuk menentukanNilai Wajar dan Nilai Likuidasi. Dalam setiap tahapan pengelolaan BMN khususnya penghapusan BMN, penilaian mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*the Highest and Best Use* atau HBU). Selain itu KPKNL Palu juga membantu pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah (BMD), untuk menentukan nilai wajar dalam rangka pemindahtanganan BMD;
- d. Seksi Pelayanan Pengurusan Piutang Negara, KPKNL Palu memiliki peran

strategis dalam rangka menyelamatkan keuangan negara. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penegakan hukum dalam penyelesaian pengurusan Piutang Negara/daerah baik kepada Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang Negara, KPKNL Palu berkontribusi dalam pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara;

- e. Bidang Pelayanan Lelang, KPKNL Palu memiliki peran strategis dalam memberikan layanan lelang yang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara adil dan transparan. KPKNL Palu juga terus berupaya menjadikan lelang sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales means auction*) dengan melakukan penggalan potensi lelang dan menyebarkan cara penjualan lelang kepada masyarakat luas. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya produk hukum risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai akta *van transport* untuk kepentingan peralihan hak. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Palu berkontribusi dalam pemasukan PNBP berupa bea lelang. Saat ini KPKNL Palu juga sudah mengimplementasikan Lelang Internet (*e-auction*) yang memiliki banyak keunggulan, diantaranya: lelang menjadi lebih mudah, dapat diakses di manapun dan kapanpun, lebih efisien karena tidak membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi bagi para pesertanya, penawaran lebih cepat dilakukan karena penawaran lelang dapat dilakukan begitu pengumuman lelang sudah diunggah di situs lelang DJKN (www.lelang.go.id) dan penawaran langsung diterima dalam hitungan detik, dan yang penting juga *e-auction* ini telah memberikan kontribusi hasil lelang yang lebih optimal dibandingkan dengan lelang konvensional;
- f. Seksi Hukum dan Informasi, memiliki peran melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang

- negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
- g. Seksi Kepatuhan Internal, berperan dalam melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan fungsional di KPKNL Palu sesuai SK terdiri dari Pejabat Fungsional pelalang dan Penilai, sedangkan Pejabat Juru Sita, Pemeriksa belum menjadi Pejabat Fungsional.

B. ISU STRATEGIS

Adapun Isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi pada KPKNL Palu dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Isu Strategis Seksi PKN adalah:

- Berkoordinasi dengan satker K/L di wilayah Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara seperti pengelolaan BMN dan pemanfaatan BMN;
- Memberikan bimbingan teknis kepada satker K/L di wilayah Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan rekonsiliasi BMN dengan menggunakan aplikasi SIMAN secara online;
- Memberikan reward dan punishment kepada satker K/L di wilayah Sulteng terhadap kepatuhan pelaksanaan rekonsiliasi pada KPKNL Palu;
- Upaya pencapaian manfaat ekonomi Barang Milik Negara dalam bentuk penerimaan Negara bukan pajak dan penghematan biaya (cost saving); dan ;
- Membantu dan mengkoordinasikan pensertifikatan BMN berupa tanah pada satker di wilayah Sulteng sebanyak 3368 bidang tanah.
- Melaksanakan evaluasi kinerja BMN dan pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

2. Isu strategis Seksi Piutang Negara adalah:

- Perlunya segera dilakukan sosialisasi serta upaya penegakan hukum Pengurusan Piutang Negara/Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah mengingat masih ada SKPD yang belum memahami/mengerti alur Pengurusan Piutang Negara/Daerah dan ;

- Target penyelesaian atas piutang yang tinggi dibandingkan potensi piutang yang dapat tertagih.
3. Isu strategis Pelayanan Lelang adalah:
- Mendukung terwujudnya kelancaran pelayanan lelang sebagai salah satu penerimaan PNBP. Untuk itu perlu mengoptimalkan kinerja para pejabat lelang dan pejabat fungsional pelelang dengan memberikan penyegaran bagi para pejabat lelang dan pejabat fungsional pelelang, memberdayakan Balai Lelang, dan memaksimalkan penggunaan aplikasi penunjang lelang (e-Auction);
 - Mewujudkan keikutsertaan masyarakat luas untuk menggunakan lelang sebagai salah satu sarana jual/beli yang aman, mudah transparan dan mendapat perlindungan hukum yang pasti dan ;
 - Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara/daerah yang lebih baik khususnya pemindahtanganan BMN dan/atau BMD.
4. Isu strategis Pelayanan Penilaian adalah:
- Penilaian BMN dengan tujuan pengelolaan BMN dalam bentuk pemanfaatan, dan pemindahtanganan, serta turut andil dalam perolehan PNBP dari pengelolaan BMN tersebut.
 - Adanya kepercayaan Aparat Pemeriksa Fungsional pada Pemerintah Daerah yang mempercayakan penilaian BMD dilakukan oleh Penilai KPKNL Palu, sehingga beberapa Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah telah mengajukan permohonan penilaian BMD dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pemindahtanganan dan pemanfaatan BMD. KPKNL Palu dalam melaksanakan penilaian BMD tetap mengedepankan asas profesionalisme dengan mengutamakan tugas dan fungsi penilaian BMN. Dalam kurun waktu 2023 KPKNL Palu telah menyelesaikan permohonan penilaian BMD dengan menerbitkan 262 Laporan Penilaian dengan tujuan penilaian adalah penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pemindahtanganan dan pemanfaatan BMD;
 - Kegiatan pembinaan penilai tetap perlu dilaksanakan agar penilai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan diklat mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi penilaian, diskusi, peer review, dan verifikasi kompetensi penilai pemerintah.
5. Isu strategis Subbagian Umum adalah:

- Berperan aktif dalam menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai dalam rangka mendukung layanan unggulannya KPKNL Palu.
 - Dengan diserahkannya gedung perkantoran KPKNL Palu yang berada pada Jalan S. Parman Kota Palu kepada Ombudsman Provinsi Sulawesi Tengah, maka KPKNL Palu harus memindahkan dan menata ulang arsip-arsip yang berada pada gedung tersebut ke gedung arsip yang berada di belakang kantor. Pindahan, pendataan dan penataan ulang arsip tersebut membutuhkan waktu agar sesuai dengan ketentuan kearsipan yang berlaku.
 - Seiring dengan diterapkannya penggunaan tata naskah dinas secara elektronik maka diperlukan dukungan teknis di jaringan internet yang stabil. Begitu juga dengan pengelolaan arsip elektronik yang berbeda dengan pengelolaan arsip fisik.
6. Isu strategis Seksi Hukum dan Informasi adalah:
- Mewujudkan kelancaran penanganan/penyelesaian kasus perkara gugatan di pengadilan, penyajian informasi/kehumasan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara yang efektif;
 - Mewujudkan pengelolaan data dan penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang yang cepat dan akurat, pengawasan sistem aplikasi yang terkendali serta pengelolaan jaringan komunikasi data yang baik sehingga informasi tersaji sesuai kebutuhan dan;
 - Melaksanakan proses penerimaan hasil pengurusan piutang dan lelang serta penerimaan negara lainnya secara efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Tantangan/Hambatan

a. Luasnya Wilayah kerja.

Luas provinsi Sulteng adalah ± 67.000 Km² yang terdiri dari 1 Kota dan 12 Kabupaten. KPKNL Palu juga melayani 476 satuan kerja (satker) Kementerian/Lembaga, perbankan, kejaksaan, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang tersebar di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah sehingga koordinasi dengan pihak-pihak tersebut memerlukan biaya yang cukup besar dan

waktu yang lama, sedang biaya dan SDM yang tersedia terbatas.

- b. Terbatasnya SDM.
Dengan beban kerja sebagaimana disebutkan pada poin a di atas dan cakupan wilayah yang luas, saat ini KPKNL Palu didukung oleh 32 pegawai.
- c. Kurangnya tingkat kepatuhan dan kesadaran satker dalam pengelolaan BMN karena kurangnya dukungan peraturan yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palu.
- d. Penerapan tata naskah dinas secara elektronik pada aplikasi Satu Kemenkeu serta pelaksanaan Join Domain pada instansi Kemenkeu menjadi tantangan tersendiri bagi pegawai untuk segera beradaptasi dan merubah pola kerja atau kebiasaan lama.
- e. Belum memadainya infrastruktur dan fasilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palu seperti jaringan internet yang terkadang terkena kendala jaringan sehingga bandwidth menjadi lambat dan komputer pengolah data yang terbatas.
- f. Besarnya Piutang Daerah yang belum diurus sesuai ketentuan peraturan perundangan pada SKPD di Wilayah Sulawesi Tengah. Di samping itu Piutang Negara/Daerah yang telah diproses saat ini, banyak yang tidak didukung dengan kelengkapan data seperti data-data perusahaan bila Debitur/Penanggung Utang berbentuk badan hukum, serta tidak adanya barang jaminan utang. Sebagian debitur/penanggung utang tidak didukung dengan adanya barang jaminan, dari 32 debitur/penanggung utang, hanya terdapat 12 debitur yang memiliki barang jaminan, serta debitur/penanggung utang tidak diketahui keberadaannya / perusahaannya sudah tutup.
- g. Tidak lengkapnya/ tersedianya berkas lelang yang mengakibatkan penanganan perkara di pengadilan menjadi tidak maksimal.
- h. Tidak diketahuinya nama penyeter/penanggung utang pada saat pembayaran angsuran dari penanggung utang melalui rekening bank sehingga berakibat bendahara penerimaan mengalami kesulitan dalam memonitor arus uang yang masuk. Untuk itu diperlukan koordinasi antara Bendahara Penerimaan KPKNL Palu dengan pihak penyerah piutang/kreditur secara berkala melalui rekening bank yang tidak diketahui.
- i. Perlunya sosialisasi lebih lanjut kepada Pejabat Lelang Kelas I, II, Balai Lelang dan stakeholder mengenai peraturan perundang-undangan maupun aplikasi yang menunjang pelayanan seksi lelang. Kurangnya pemahaman pengguna layanan lelang terhadap pelaksanaan lelang lewat elektronik serta jaringan internet yang

tidak lancar membuat pelaksanaan lelang elektronik terkendala. Sulitnya pemenang lelang untuk balik nama kendaraan bermotor dalam pelaksanaan lelang khususnya eksekusi barang rampasan berupa kendaraan yang perolehannya berasal dari pembelian yang dibiayai lewat perusahaan pembiayaan/Leasing dan belum lunas karena dokumen kepemilikan (BPKB) dikuasai pihak ke III (perusahaan penyedia jasa pembiayaan).

- j. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang dalam rangka penanganan perkara terkait sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas.

SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan, yang menguraikan secara umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic Isus) yang dihadapi organisasi.
2. BAB II : Perencanaan Kinerja
Bagian ini yang menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja KPKNL Palu Tahun 2023.
3. BAB III : Akuntabilitas Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang :
 - A. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan:
 - a. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - b. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
 - c. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - d. membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 - e. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - f. menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya; dan
 - g. menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran: Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. BAB IV : Penutup

Bagian ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah merupakan suatu proses yang dilakukan KPKNL Palu dalam menentukan strategi untuk melakukan kegiatan sesuai sistem. Untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi agar mempunyai keunggulan kompetitif, KPKNL Palu perlu menetapkan perjanjian kinerja dalam bentuk Kontrak Kinerja dengan seluruh pegawainya. Penetapan/perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Sepanjang tahun berjalan, dilaksanakan kegiatan bimbingan dan konsultasi secara berkala atas kinerja masing-masing pegawai dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja.

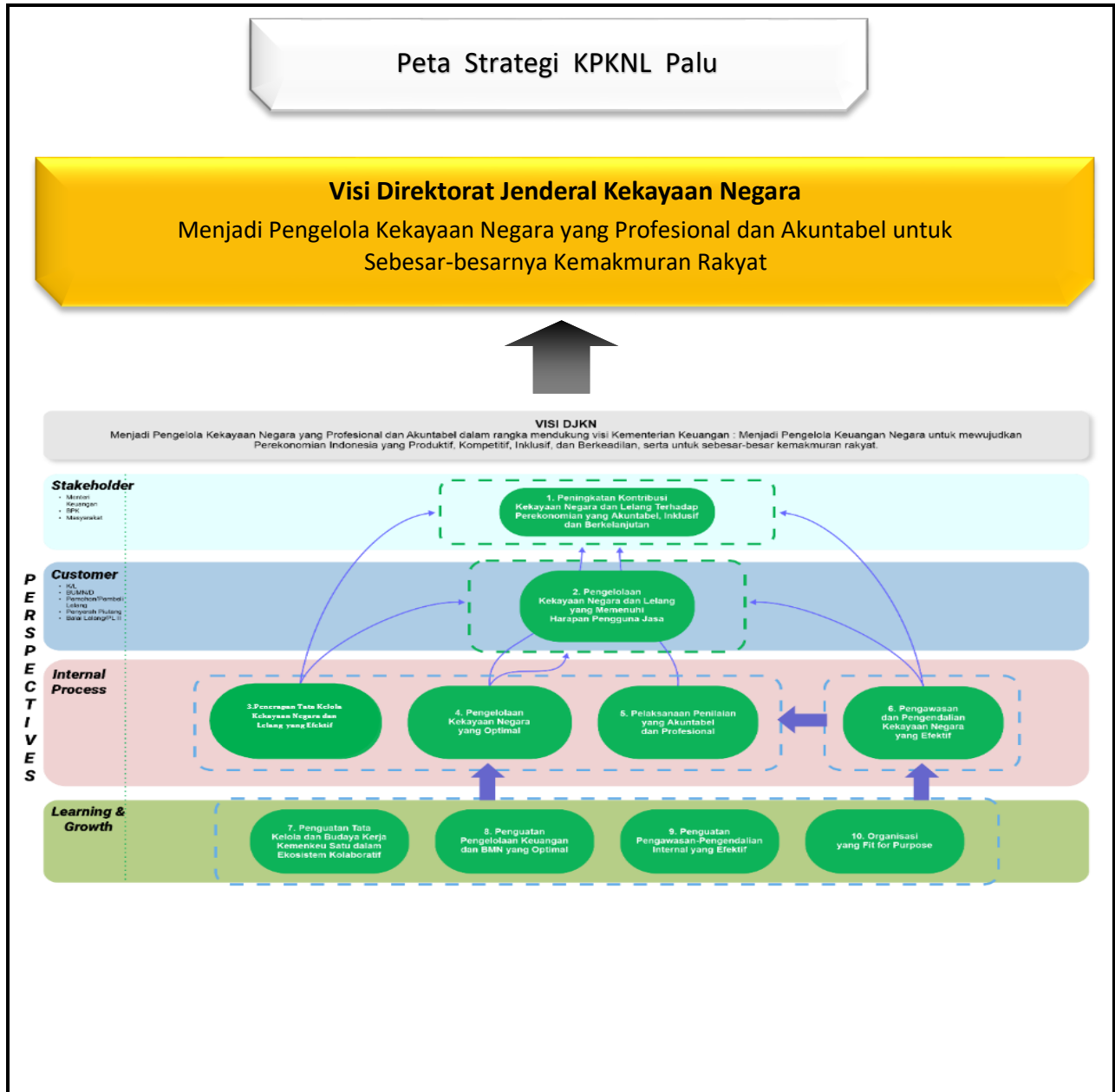
Bimbingan dan konsultasi tersebut dilakukan oleh masing-masing atasan langsung secara berjenjang. Pada periode tahun berjalan juga dilakukan penilaian kinerja dan penilaian perilaku. Hasil dari penilaian tersebut dapat dijadikan umpan balik untuk proses pembimbingan dan konsultasi serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Pada tahun 2023, KPKNL Palu memiliki 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan uraian dari 10 (Sepuluh) Sasaran Strategis.

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, telah dirumuskan dalam sasaran strategi KPKNL Palu Tahun 2023 yang tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Palu.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGPALU
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	3a-CP Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%
		3b-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	100%
		3c-CP Persentase Penyelesaian BKP	100%
		3d-CP Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%
		4b-CP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%
		5b-CP Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%
		5c-N Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	86%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-CP Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-N Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	8a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	9a-CP Indeks Integritas Organisasi	96.22
		9b- CP Indeks Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif	60
10	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
		10b-N Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		Rp.396.090.000,00
1	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp.4.102.000,00
3	Pengelolaan Aset	Rp 391.988.000,00
Program Dukungan Manajemen		Rp.1.694.308.000,00
1	Legislasi dan Litigasi	Rp.32.740.000,00
2	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp.1.627.619.000,00
3	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp.8.893.000,00
5	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp.25.056.000,00

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
Arif Bintarto Yuwono

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palu



Ditandatangani Secara Elektronik
Krisdianto

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGPALU
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
3	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							
3a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%
3b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
3c-CP	Persentase Penyelesaian BKP	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
3d-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
5a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%

Kode SS/IKU		Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5b-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
5c-N	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	20%	40%	40%	60%	60%	86%	86%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
6a-CP	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	86%	86%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							
7a-N	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100	100	100	100	100	100	100
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
9	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif							
9a-CP	Indeks Integritas Organisasi						96,22	96,22
9b-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif						60	60
10	Organisasi yang Fit For Purpose							
10a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko						80	80
10b-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM						100	100

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Dan Lelang Palu,



Ditandatangani Secara Elektronik

Krisdianto



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALUKEMENTERIAN
KEUANGAN
TAHUN 2023

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1: Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1-Q4	Seksi PKN	
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Palu



Ditandatangani Secara Elektronik
Krisdianto



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Krisdianto.	NAMA	Arif Bintarto Yuwono	
NIP	198105242001121001	NIP	197109121997031001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina, IV/a	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palu	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan
2.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara,	Persentase Produktivitas Lelang	80%	Penerima Layanan

	Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)			
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	Penerima Layanan
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	Penerima Layanan
5.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%	Proses Bisnis
6.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)	Persentase bidang tanah BMN yang disertipatkan	100%	Proses Bisnis
7.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)	Persentase Penyelesaian BKPN	100%	Proses Bisnis
8.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses Bisnis

9.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	Proses Bisnis
10.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	Proses Bisnis
11.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	Proses Bisnis
12.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	Proses Bisnis
13.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	86%	Proses Bisnis
14.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara,	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	Proses Bisnis



	Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)			
15.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100	Penguatan Internal atau Anggaran
16.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	Penguatan Internal atau Anggaran
17.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)	Indeks Integritas Organisasi	96,22	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)	Indeks Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif	60	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Organisasi yang Fit For Purpose (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	Penguatan Internal atau



20.	Organisasi yang Fit For Purpose (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal
-----	---	---	-----	--------------------

	Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)		Anggaran
B. TAMBAHAN			
PERILAKU KERJA			
1	Berorientasi pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.	
2	Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.	
3	Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.	
4	Harmonis		



PERILAKU KERJA			
	Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.	
5	Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.	
6	Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.	
7	Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.	

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik.

Krisdianto

198105242001121001

31 Januari 2023

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik.

Arif Bintarto Yuwono

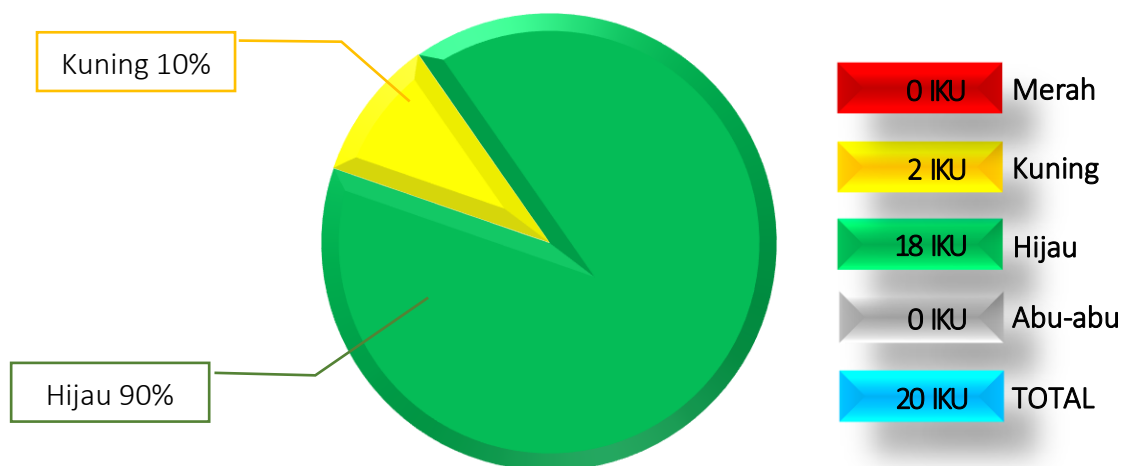
197109121997031001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Palu tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palu adalah sebesar 111,65%.



Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada tiap perspektif sebagai berikut:

NILAI KINERJA ORGANISASI

KPKNL PALU
PERIODE PROGNOSA DESEMBER
TAHUN 2023

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Des	Rnhnt Awal	Rnhnt Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective (30%)	30%						34.06%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan							113.52%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100.00%	120.00%	14.00%	33.33%	120.00%	120.00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80.00%	105.00%	14.00%	33.33%	131.25%	120.00%	hijau
1c-CP	Indeks Integritas	P/M	88.67%	89.17%	14.00%	33.33%	100.56%	100.56%	hijau
	Customer Perspective (20%)	20%						20.07%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							100.33%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100.00%	89.03%	14.00%	50.00%	89.03%	89.03%	kuning
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100.00%	111.63%	14.00%	50.00%	111.63%	111.63%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)	25%						29.18%	
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							120.00%	
3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	68.00%	82.45%	19.00%	36.54%	121.25%	120.00%	hijau
3b-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	P/L	100.00%	142.38%	19.00%	36.54%	142.38%	120.00%	hijau
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100.00%	131.00%	14.00%	26.92%	131.00%	120.00%	hijau
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120.00%	
4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	25.00%	15.00%	14.00%	50.00%	140.00%	120.00%	hijau
4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	P/M	70.00	85.83	14.00%	50.00%	122.61%	120.00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							110.57%	
5a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	94.00%	100.00%	14.00%	33.33%	106.38%	106.38%	hijau
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/M	100.00%	100.00%	14.00%	33.33%	200.00%	120.00%	hijau
5c-N	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	P/M	86.00%	90.59%	14.00%	33.33%	105.34%	105.34%	hijau
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							116.28%	
6a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	P/M	86.00%	100.00%	14.00%	100.00%	116.28%	116.28%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)	25%						28.35%	
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							120.00%	
7a-N	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	P/M	100%	120.00%	14.00%	100.00%	120.00%	120.00%	
8	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							108.61%	
8a-CP	Indeks Kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran	P/M	100.00	97.21	14.00%	50.00%	97.21%	97.21%	kuning
8b-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	P/M	15.00%	0.00%	14.00%	50.00%	200.00%	120.00%	hijau
9	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif							120.00%	
9a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	P/M	60.00%	95.37%	14.00%	100.00%	158.95%	120.00%	hijau
10	Organisasi yang Fit For Purpose							105.00%	
10a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/M	80.00%	97.50%	14.00%	50.00%	121.88%	120.00%	hijau
10b-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	P/M	100.00%	90.00%	14.00%	50.00%	90.00%	90.00%	kuning
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								111.65%	hijau

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu-Three Tahun 2023 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Three sebagai berikut :

A. Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

1. IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang

- Realisasi capaian IKU persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tahun 2023 sebesar Rp.25.056.184.521 (169,07%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp14.820.000.000 (100%) sehingga mendapat indeks capaian 120,00%, IKU ini terdiri dari 3 (tiga) komponen PNBPN Pengelolaan BMN, PNBPN Piutang Negara, dan PNBPN Lelang. Realisasi penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan Negara dan lelang sampai Desember 2023 telah melampaui target yang telah ditetapkan.
- Langkah yang telah diambil untuk mencapai capaian tersebut adalah dengan upaya sosialisasi dan penggalian potensi pengelolaan BMN melalui pemanfaatan dan penjualan BMN kepada para satuan kerja yang intens. Penggalian potensi lelang juga banyak dilakukan kepada pihak Pemerintah Daerah dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD).

2. IKU Persentase Produktivitas Lelang

Realisasi frekuensi lelang laku selama tahun 2023 mencapai 216 kali. Persentase capaian produktivitas lelang sebesar 105% dari target sebesar 80%. Besaran realisasi yang diperoleh KPKNL Palu sebesar 105%, peningkatan persentase produktivitas lelang ini di pengaruhi oleh masifnya penggalian potensi lelang yang dilakukan oleh para pejabat lelang di KPKNL Palu. Dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2023, perekonomian kota Palu semakin pulih dan bertumbuh. Sosialisasi dengan pembeli potensial sebelum pelaksanaan lelang melalui pengumuman pada koran maupun katalog yang dibagikan melalui media sosial juga gencar dilakukan .

3. Indeks Integritas

Realisasi Integritas berdasarkan survey penilaian integritas tahun 2023 mencapai 89,17% dari target sebesar 88,67%.

B. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

4. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

Sama halnya dengan kenaikan IKU Capaian Persentase Produktivitas Lelang , Capaian Persentase Realisasi Pokok Lelang KPKNL Palu tahun 2023 mencapai 89,03%

(Rp181.611.802.638) dari target yang ditetapkan yaitu senilai Rp204.000.000.000 (100%). Lebih rinci, realisasi pokok lelang terdiri dari realisasi pokok lelang dari Pejabat Lelang Kelas I senilai Rp.35.895.810.338) dan Pegadaian senilai Rp.145.715.992.300. Capaian ini berhasil diraih oleh KPKNL Palu sejak gencarnya dilakukan penggalan potensi lelang kepada Pemerintah Daerah di Seluruh wilayah kerja KPKNL Palu.

5. IKU Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara

Realisasi capaian IKU Tingkat Penurunan outstanding piutang Negara tahun 2023 sebesar Rp.7.687.266.007 (111,63%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp6.886.134.353 (100%) yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan sampai Desember 2023 capaian tingkat penurunan outstanding piutang negara telah melampaui target yang telah ditetapkan. Upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi debitur yang kurang kooperatif, dan debitur tidak ditemukan keberadaannya diantaranya dengan optimalisasi upaya penagihan, salah satunya dengan menghubungi penanggung hutang secara intens dan berkoordinasi secara simultan kerjasama dengan beberapa instansi terkait.

C. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Optimal

6. IKU Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Realisasi IKU Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2023 sebesar 82,45% dari target yang telah ditetapkan 68% . Hal ini mencerminkan pelaksanaan IKU persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2023 telah berjalan dengan baik. Hambatan yang dialami yaitu lambatnya pengumpulan form dari satker yang terlibat dalam proses IKU SBSK, tentu saja hal ini diakibatkan satuan kerja yang kurang memahami tatacara pengisian formulir pendataan sehingga diperlukan konfirmasi bahkan diperlukan peninjauan langsung terhadap objek yang dilakukan .

7. IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

Jumlah BMN berupa bidang tanah yang telah diidentifikasi telah maupun belum bersertifikat pada kementerian lembaga didasarkan pada data aplikasi SIMAN. Pada tahun 2023 target sertifikasi bidang tanah sebanyak 604 NUP dan telah tercapai sebanyak 860 berupa NUP dan/atau bidang tanah (142%). hal ini mencerminkan IKU persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan mengalami kenaikan dalam hal target dan juga pencapaiannya. Hal ini dicapai dengan dilakukannya koordinasi pihak satker dan Kantor Pertanahan secara intens dan upaya updating verifikasi pada aplikasi SIMAN.

8. IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

Realisasi persentase efektivitas penyelesaian BKPN tahun 2023 sebesar 131% dari target 100%, target 13 BKPN dengan capaian penyelesaian 17 BKPN. Hal ini mencerminkan pencapaian IKU telah terpenuhi dengan baik. Adapun langkah-langkah yang diambil untuk mencapai realisasi tersebut yaitu dengan menghubungi penanggung hutang secara intens dan berkoordinasi secara simultan kerjasama dengan beberapa instansi terkait.

D. Sasaran Strategis Pelaksanaan Penilaian Yang Akuntabel dan Profesional

9. IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian oleh KPKNL Palu mencapai 0,15% dari target yang ditetapkan yaitu 25%. Hal ini menggambarkan persentase capaian terhadap target yang positif yaitu mencapai 120%. Capaian ini diraih dengan melakukan koordinasi dengan satker terkait permohonan penilaian yang diajukan serta meminta data yang dibutuhkan guna membantu dalam analisa perhitungan nilai. Kendala yang dihadapi selain pandemi yang menyebabkan menurunnya mobilitas pegawai, adalah nilai yang diajukan Satker lebih tinggi daripada nilai wajar yang dihasilkan setelah dilakukan penilaian dan data isian pada form yang disampaikan satker tidak valid (khusus dalam hal penilaian yang tidak dilakukan survei lapangan). Karenanya, perlu dilakukan koordinasi dengan satker terkait permohonan penilaian yang diajukan serta meminta data yang dibutuhkan guna membantu dalam analisa perhitungan nilai dan sosialisasi

10. Sasaran Strategis Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien Realisasi Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien pada Tahun 2023 85,83% dari target yang ditetapkan 70%.

E. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

11. IKU Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction

Realisasi IKU capaian persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-convention auction sebesar 100% dari target 94% (dengan indeks 106,38%). Hal ini mencerminkan pelaksanaannya telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tentu pandemi menjadikan semua pengguna layanan agar lelang diselenggarakan secara daring (e-auction).

12. IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Realisasi capaian IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) mencapai sebesar 165 dari target 160, atau sebesar 120,00% dari target yang telah

ditetapkan. Hal ini mencerminkan pelaksanaan IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) telah dijalankan dengan baik.

13. IKU Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online

Realisasi jumlah permohonan lelang online selama tahun 2023 yaitu sebanyak 548 dari total keseluruhan permohonan lelang 594, sehingga persentase permohonan lelang online selama Tahun 2023 yaitu sebanyak 90,59% dari target 86%.

F. Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

14. IKU Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

Realisasi IKU persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara tahun 2023 adalah sebesar 100% (indeks 116,28%) dari target sebesar 86%. Dalam hal ini masih adanya, ke-tidak-segera-an satker dalam menindak lanjuti Surat Persetujuan yang diterbitkan kerap terjadi dan bahkan masih banyak yang belum menaati peraturan terkait pengelolaan BMN.

G. Sasaran Strategis Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif

15. IKU Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik

Realisasi IKU Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik pada Tahun 2023 120% dari target 100%

H. Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Optimal

16. IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Untuk persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPKNL Palu dengan realisasi 97,21% di mana terdapat kenaikan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 96,85%. Dalam IKU ini terdiri dari 2 (dua) komponen dari capaian SMART DJA dengan bobot 50% dari 91,11% (berdasar capaian SMART DJA 31 Desember 2023) dan IKPA 50% dari 95,79% dengan 11 (sebelas) hal yang menjadi unsur perhitungan yaitu revisi DIPA, deviasi Hal III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, capaian output, efisiensi, konsistensi RPD, penyerapan anggaran.

Selama tahun 2023 KPKNL Palu telah melaksanakan pengelolaan anggaran dengan cukup baik dengan catatan telah berhasil dikarenakan target IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran tercapai sebesar 97,21% dari target 100%. Pelaksanaan anggaran telah optimal ini harus menjadi evaluasi agar tahun depan pelaksanaan

anggaran dapat dilaksanakan dengan baik, terencana, dan terorganisir dengan baik serta mengacu pada kontrak kinerja Kemenkeu-three. Kendala yang dialami yaitu Nilai penyerapan anggaran atas pagu netto rendah, target IKU yang diamanatkan tidak tercapai. Karena itu, KPKNL Palu melakukan pemetaan RPD ulang, percepatan belanja modal, dan mengintruksikan seluruh unit untuk membuat rencana kerja perjalanan dinas dan juga melakukan revisi anggaran sesuai arahan terkait pandemi. Realisasi Anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, diperlukan dukungan sumber daya keuangan guna membiayai program dan kegiatan dimaksud. Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan KPKNL Palu berasal sepenuhnya dari APBN yang dituangkan dalam DIPA nomor SP DIPA- 015.09.2.538002/2023 tanggal 30 November 2022 yang terinci dalam tabel berikut.

No	Uraian	Pagu DIPA	Blokir	Sisa Pagu	Realisasi	
					Rp	%
1	Belanja Pegawai	0	0	0	0	0
2	Belanja Barang	1,783,174,000	0	72,350,004	1,710,823,996	95.94%
3	Belanja Modal	729,968,000	0	68,168,946	661,799,054	90.66%
Total						

Pada Tahun 2023, KPKNL Palu tidak memiliki DIPA untuk Belanja Pegawai, besarnya realisasi DIPA untuk tahun 2023 adalah sebesar 2,372,623,050,- dari target sebesar 2,513,142,000,-. Realisasi penyerapan DIPA untuk tahun anggaran 2023 dimaksud telah sesuai digunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahun 2023, dan dari aspek keuangan itu sendiri telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara.

17. IKU Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

Realisasi IKU capaian Deviasi data PNBPN fungsional DJKN yaitu sebesar 0% dari target sebesar 15%. (Persentase terhadap indeks capaian sebesar 120%). Hal ini dicapai dengan sosialisasi kepada satker tentang pembukuan data PNBPN Biad PN dan Bea Lelang, sebab kurangnya pemahaman satuan kerja terhadap pembukuan data PNBPN

Biad PN dan Bea Lelang menimbulkan rawannya kesalahan pada proses tersebut oleh satuan kerja.

I. Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

18. IKU Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara

Realisasi IKU persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara tahun 2023 adalah sebesar 95,37 (indeks 158,95%) dari target sebesar 60. Dalam hal ini masih adanya , ke-tidak segera-an satker dalam menindak lanjuti Surat Persetujuan yang diterbitkan kerap terjadi dan bahkan masih banyak yang belum menaati peraturan terkait pengelolaan BMN.

J. Sasaran Strategis Organisasi yang Fit for Purpose

19. IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko

Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko KPKNL Palu tahun 2023 telah mencapai angka 97,50 diatas target yang ditetapkan sebesar 80 (indeks capaian 121,88%)

20. IKU Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM

Pada Tahun 2023 KPKNL Palu masih belum berhasil meraih predikat ZI-WBBM dengan realisasi 90 dengan artian tidak lolos penilaian level TPK dan/atau tidak memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM karena alasan non fraud dari target 100.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah merupakan amanat dalam Permenpan Nomor 53 tahun 2014 bahwa Menteri/Pimpinan lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hal tersebut KPKNL Palu menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud, yang merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban hasil perjanjian kinerja yang telah disepakati antara pimpinan dan bawahan dari sebuah fungsi pekerjaan atau aktivitas selama periode tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dengan kewenangan yang diberikan dalam melakukan pengelolaan dan penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang, dan sekaligus berperan dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam rangka peningkatan good governance yang mengacu pada rencana strategis KPKNL Palu lima tahunan (2020-2024). Pengukuran kinerja sasaran didasarkan pada penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2022 telah ditetapkan 11 sasaran strategis dan 19 IKU yang merupakan indikator Kontrak Kinerja KPKNL Palu tahun 2022.

Secara umum, seluruh pencapaian sasaran strategis selama tahun 2022 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, tanpa ada satu IKU pun yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja secara keseluruhan tersebut merupakan hasil kerja seluruh staf, pegawai dan pejabat di jajaran KPKNL Palu termasuk pegawai pemerintah non pegawai negeri serta pegawai outsource.

Keberhasilan tersebut diantaranya adalah :

- Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tahun 2023 sebesar Rp.25.056.184.521 (169,07%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp14.820.000.000 (100%) sehingga mendapat indeks capaian 120,00%, IKU ini terdiri dari 3 (tiga) komponen PNBP Pengelolaan BMN, PNBP Piutang Negara, dan PNBP Lelang.

Dengan menganalisa IKU tersebut, maka dapat dibuat Action Plan yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pencapaian kinerja pada KPKNL Palu pada tahun berikutnya. Untuk meningkatkan jumlah frekuensi lelang pada tahun 2024, KPKNL Palu akan melakukan

penggalian potensi lelang ke instansi/lembaga yang beragam dan sosialisasi serta penyebaran informasi ke masyarakat umum.

Sedangkan berkaitan dengan pengurusan piutang negara, pada tahun 2024 KPKNL Palu akan lebih mengoptimalkan penegakan hukum dalam pengurusan Piutang Negara Kementerian dan Lembaga dan Piutang Daerah. Khusus Piutang Daerah akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Anggota PUPN Cabang yang berasal dari Unsur Pemerintah Daerah yang merupakan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diharapkan pada tahun 2024 akan lebih ditingkatkan baik proses penilaian dan pengelolaan maupun edukasi kepada instansi pengguna layanan. Perlu sinergi dalam melakukan peran DJKN dalam pengelolaan BMN sehingga diharapkan memberi dampak bagi penerimaan Negara, dan aset Negara dapat dioptimalkan agar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat

Kiranya Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan pedoman yang harus diimplementasikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi pada periode berikutnya, sehingga di masa yang akan datang KPKNL Palu dapat semakin tampak potensinya, meningkatkan kinerjanya, dan makin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah yang memberikan pelayanan yang profesional.